

LUMBUNG PANGAN DAN PENGGILINGAN PADI SEBAGAI SUMBER PERMODALAN ALTERNATIF DI PEDESAAN

YANTER HUTAPEA, HERMANTO RACHMAN DAN VIKTOR SIAGIAN
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan

ABSTRAK

Pengembangan kelembagaan permodalan seperti lumbung pangan dan usaha penggilingan padi di pedesaan Sumatera Selatan mempunyai arti penting dalam mendukung pencapaian ketahanan pangan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan dan permasalahan lumbung pangan dan penggilingan padi dalam melayani permodalan usahatani. Pengkajian ini dilaksanakan pada bulan Maret hingga Desember 2006 di Kabupaten OKU Timur, Oku Selatan, OKI, Muara Enim, Lahat, Musi Rawas, Musi Banyuasin dan Banyuasin. Hasil Pengkajian menunjukkan bahwa penggilingan padi meskipun dimiliki secara perorangan, selain berfungsi sebagai lembaga produksi, juga menjalankan perannya sebagai lembaga yang menyediakan modal kerja bagi petani. Dalam kiprah usahanya dengan keterbatasan yang ada, dirasakan sebagai penolong karena kemudahan-kemudahan yang diberikan untuk melayani petani. Lumbung pangan sebagai lembaga pembentukan pemerintah, dalam melayani kebutuhan modal petani, belum mampu berperan penuh, karena keterbatasan kemampuannya, sehingga lumbung ini perlu didukung oleh pemodal-pemodal baik formal (Bank) maupun informal (perorangan) di pedesaan guna melayani kebutuhan petani.

Kata Kunci : *Lumbung pangan, Sumber permodalan alternatif, Penggilingan padi.*

PENDAHULUAN

Modal mempunyai peran yang penting dalam usaha pertanian. Keyakinan ini didasarkan pada kesanggupan modal untuk menciptakan faktor-faktor lain yang penting artinya dalam pembangunan. Pengembangan sektor pertanian memerlukan tenaga ahli, perbaikan berbagai sarana dan prasarana, penyediaan input. Tersedianya modal yang cukup dapat membantu penciptaan faktor tersebut (Sukirno, 1985). Disadari juga oleh berbagai kalangan, bahwa sistem pemerintahan, kesanggupan untuk menggunakan teknologi bahkan corak sikap masyarakat memegang peranan yang tidak kalah penting dalam penciptaan pembangunan ekonomi.

Aksesibilitas petani dalam bidang pertanian di pedesaan masih terikat pada kekerabatan. Beberapa kegiatan ditentukan oleh kelompok yang lebih luas, demikian juga hubungan pertukaran barang, ada yang dilakukan dengan sistem kekerabatan yang sudah mentradisi (Smelser *dalam* Weiner, 1986). Akses petani terhadap lembaga permodalan usaha di pedesaan juga terpatritasi dalam sistem kekerabatan, utamanya jika lembaga ekonomi tersebut terbentuk dari bawah.

Dari sisi perspektif modernisasi, struktur lembaga ekonomi pedesaan dapat dilihat dari formalitas dan kekuatannya sebagai lembaga yang beroperasi di pedesaan. Pengamatan di lapangan menunjukkan adanya enam jenis lembaga ekonomi yang menonjol, yaitu terkait dengan: permodalan, penyediaan agroinput, aktivitas budidaya (tenaga kerja), pengolahan hasil pertanian, pemasaran produk dan pendukung (penyuluhan, penelitian) (Syahyuti, 2004).

Pengembangan kelembagaan permodalan secara mandiri dan berkesinambungan seperti lumbung pangan dan usaha penggilingan padi di pedesaan Sumatera Selatan, mempunyai arti penting dalam mendukung pencapaian ketahanan pangan (Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan, 2006). Upaya penguatan kelembagaan tersebut diharapkan dapat mendorong aliran modal ke pedesaan dan mengelolanya untuk mengembangkan potensi pertanian. Hal ini sangat penting mengingat dewasa ini arus modal lebih kuat mengalir dari desa ke kota dari pada sebaliknya.

Pengkajian tentang sumber-sumber permodalan yang dapat memberikan layanan pada petani/kelompok, khususnya melalui lumbung pangan dan penggilingan padi menjadi penting untuk dilakukan. Mengingat dalam kurun waktu yang sangat panjang, pemerintah telah banyak mengembangkan

berbagai kelembagaan permodalan bagi petani, tetapi sebagian besar lembaga tersebut berakhir dengan kinerja yang kurang menggembirakan. Tulisan ini bertujuan untuk: mengetahui kemampuan dan permasalahan lumbung pangan dan penggilingan padi dalam melayani permodalan usahatani.

METODOLOGI

Pengkajian ini dilaksanakan pada bulan Maret hingga Desember 2006. Penentuan lokasi pengkajian dilakukan secara *purposive*, pada desa yang memiliki lumbung pangan dan penggilingan padi terbesar di Kabupaten OKU Timur, OKU Selatan, OKI, Muara Enim, Lahat, Musi Rawas, Musi Banyuasin dan Banyuasin. Secara keseluruhan, lokasi dan jenis lembaga yang disurvei seperti pada Tabel I.

Tabel I. Lokasi Survei Terpilih dan Jenis Lembaga Permodalan

Kabupaten	Kecamatan	Desa	Jenis Lembaga Permodalan
Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur)	Semendawai Suku III	Sido Waluyo	Lumbung pangan
		Rejosari	Penggilingan
		Trimuharjo	Penggilingan
	Belitang I	Sidomakmur	Lumbung pangan, Penggilingan
Ogan Komering Ilir (OKI)	Lempuing	Tugu Agung	Lumbung pangan, Penggilingan
		Bumi Agung	Lumbung pangan, Penggilingan
		Lubuk Seberuk	Penggilingan
	Kota Kayu Agung	Srigeni Baru	Penggilingan
		Celikah	Penggilingan
Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan)	Buay Pemaca	Sepakat Jaya	Lumbung pangan, Penggilingan
		Sri Menanti	Penggilingan
Muara Enim	Tanjung Agung	Tanjung Karang	Lumbung pangan, Penggilingan
		Sleman	Penggilingan
	Muara Enim	Muara Lawai	Lumbung pangan, Penggilingan
Musi Rawas	Megang Sakti	Megang Sakti V	Lumbung pangan, Penggilingan
	Purwodadi	P. Mardiharjo	Penggilingan
		Karyadadi	Lumbung pangan
Musi Banyuasin	Sekayu	Sekayu	Penggilingan
		Sukarami	Penggilingan
		Babat Toman	Lumbung pangan
Banyuasin	Rambutan	Sako	Lumbung pangan, Penggilingan
	Talang Kelapa	Banyu Urip	Lumbung pangan, Penggilingan
Lahat	Pulau Pinang	Tanjung Agung	Lumbung pangan, Penggilingan
	Kota Agung	Pandan Agung Ilir	Lumbung pangan, Penggilingan

Unit sampel pada kegiatan ini adalah pengusaha penggilangan padi dan pengelola lumbung pangan yang dipilih secara acak (*Random Sampling Unit*) dari masing-masing desa yang terpilih dengan total responden sebanyak 35 orang yang terdiri dari pengelola lumbung pangan 14 orang dan pengusaha penggilingan padi 21 orang.

Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan dengan pengelola lumbung pangan dan pengusaha penggilingan padi. Sumber data Sekunder diperoleh melalui pendekatan *Desk Studi*

(Review dokumenter, dan data-data dari instansi yang terkait, seperti dinas lingkup pertanian, Kantor Statistik, kepala desa dan lain-lain).

Data dan informasi yang diperlukan dalam kegiatan ini meliputi: aset yang dimiliki masing-masing lembaga, layanan yang diberikan dan permasalahan yang timbul. Data yang diperoleh ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh gambaran tentang *existing* lembaga permodalan alternatif di perdesaan (lumbung pangan dan penggilingan padi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keragaan Lumbung Pangan di Sumatera Selatan

Lumbung pangan yang disurvei berdiri tahun 1986-2005. Jumlah anggotanya berkisar 14 -78 orang. Modal tunai saat berdiri berkisar Rp 691.000 - 75.000.000,- Saat berdiri, aset sarana dan prasarana yang dimiliki lumbung pangan seperti: timbangan, lantai jemur, gudang, mesin RMU dengan berbagai jenis dan variasi. Saat ini umumnya pemilikan aset itu bertambah. Namun tidak semua lumbung yang disurvei memilikinya. Modal tunai saat ini berkisar Rp 98.000 – 61.000.000, besarnya piutang berkisar Rp 6.000.000- 67.300.000, dan besarnya hutang berkisar Rp 11.400.000-50.000.000. Namun ada diantara lumbung yang tidak memiliki piutang maupun hutang. Luas lantai jemur berkisar 18-300 m², namun ada juga lumbung yang tidak memiliki lantai jemur (64,29%), Ukuran gudang pada lumbung yang memilikinya berkisar 12-60 m², dengan kapasitas tampung berkisar 5-20 ton.

Pelayanan yang diberikan lumbung pangan pada petani adalah menerima simpanan gabah petani, peminjaman uang dan sarana produksi, layanan pengolahan lahan. Jumlah orang yang menyimpan gabah di lumbung berkisar 5 -78 orang. Gabah yang disimpan pada musim tanam terakhir dalam tahun 2006 berkisar 1,5 – 50 ton. Gabah yang disimpan di lumbung disyaratkan kering simpan, bersih dan dikurangkan.

Tabel 2. Keragaan Lumbung Pangan di Sumatera Selatan Tahun 2006

No	Uraian	Nilai	Persentase lumbung (%)
I.	Jumlah anggota lumbung pangan	32	100
2.	Kondisi keuangan saat ini		
	Modal tunai (Rp)	25.329.880	100
	Piutang (Rp)	28.462.200	35,71
	Hutang (Rp)	30.700.000	14.28
3.	Pemilikan aset saat ini		
	Huller (unit)	1	14,28
	Polisher (unit)	1	14,28
	Mesin penggerak RMU (unit)	1	21,42
	Timbangan (unit)	1-2	71,42
	Traktor tangan (unit)	1	35,71
	Power tresher	1	35,71
	Mesin jahit karung (unit)	1	7,14
	Pengering mekanis	1	7,14
	Pompa air (unit)	1	7,14
	Luas rata-rata gudang (m ²)	30,81	78,57
	Daya tampung gudang (ton)	5-20	78,57
	Lantai jemur (unit)	1	35,71
	Luas lantai jemur (m ²)	99,2	35,71

Banyaknya peminjam uang di lumbung pangan rata-rata 33 orang yang terdiri dari 24 orang anggota lumbung dan 9 orang bukan anggota. Total pinjaman petani berkisar Rp 750.000-67.311.000/lumbung.

Biasanya, tidak ada syarat khusus dalam meminjam uang di lumbung. Namun ada lumbung yang mensyaratkan jaminan surat tanah dan buku pajak kendaraan bermotor milik petani. Biasanya sangsi yang berlaku bagi peminjam yang lalai dalam mengembalikan pinjamannya, mereka tidak diberikan pinjaman lagi pada musim tanam berikutnya. Sedangkan dasar penentuan besar pinjaman diantaranya adalah luas sawah, kemampuan petani, kebutuhan petani.

Kisaran pinjaman untuk sarana produksi adalah sebagai berikut: benih 250-1.000kg/lumbung, pupuk urea 2.850-10.000 kg/lumbung, pupuk SP36 sebanyak 1.300-10.000 kg/lumbung, KCl 800-1.500 kg/lumbung, insektisida 20-50 ltr/lumbung, herbisida 20-30 ltr/lumbung.

Untuk keperluan pengolahan lahan, lumbung panganpun ada yang memiliki traktor tangan. Lahan yang diolah berkisar 10,5-50 ha/lumbung dengan hari kerjanya berkisar 15-30 hari. Sedangkan jumlah gabah yang digiling pada fasilitas penggilingan yang dimiliki lumbung sebanyak 780-100.000 kg/lumbung pada MT terakhir dalam tahun 2006.

Tabel 3. Layanan Lumbung Pangan pada Petani Tahun 2006

No	Uraian	Nilai	Persentase Lumbung (%)
1.	Jumlah petani menyimpan gabah di lumbung (orang)	29,2	78,57
2.	Gabah disimpan musim tanam akhir (ton)	11,34	78,57
3.	Lama penyimpanan di lumbung (bulan)	3 - 6	
4.	Pinjaman petani		
	Jumlah petani meminjam uang di lumbung	33 orang	64,28
	Total pinjaman modal usahatani (Rp/lumbung)	15.997.800	64,28
	Benih padi (kg/lumbung)	625	14,28
	Pupuk Urea (kg/lumbung)	6.112	42,85
	Pupuk SP36 (kg/lumbung)	5.200	42,85
	KCl (kg/lumbung)	1.033	42,85
	Insektisida (ltr/lumbung)	31,66	21,42
	Herbisida (ltr/lumbung)	25	14,28
	Pengolahan lahan (ha)	25,5	35,71

Untuk mengembangkan aktivitas lumbung, maka pihak lumbung panganpun melakukan hubungan kerja dengan pihak tertentu seperti: (1) petani, sebagai anggota lumbung, operator peralatan lumbung, (2) instansi pemerintah lingkup pertanian untuk mendapatkan pembinaan, (3) penggilingan padi, sebagai lembaga yang melakukan prosesing hasil, jika lumbung tersebut tidak memiliki penggilingan, (4) pedagang, yang membeli beras, (5) Koperasi Unit Desa (KUD) yang menyalurkan saprodi.

Terdapat 14,28% lumbung pangan yang melakukan peminjaman modal dalam musim tanam terakhir tahun 2005 dengan jumlah berkisar antara Rp 12.000.000-25.000.000 dan hanya 14,28% juga yang berniat untuk meminjam uang pada tahun mendatang, sedangkan 21,42% tidak berniat dan sisanya 64,28% ragu-ragu apakah meminjam atau tidak. Kelompok tani atau dari petani yang bermodal tampaknya lebih disukai pihak lumbung pangan untuk memperoleh bantuan modal tersebut karena tidak rumit, tanpa jaminan dan kalaupun ada sangsi, biasanya sangsinya ringan.

Perbedaan yang dilakukan oleh lumbung terhadap petani anggota dengan bukan anggota lumbung adalah dalam hal bantuan jika mendapat musibah, hari raya dan perbedaan dalam melayani pinjaman yang dibedakan dengan besar kompensasi pengembalian pinjaman. Untuk lima kaleng gabah yang dipinjam, maka anggota lumbung mengembalikan 6 kaleng, sedangkan yang bukan anggota mengembalikan 6,5 kaleng gabah.

Paling tidak terdapat 93 lumbung pangan yang pernah mendapat bantuan modal usaha dari pemerintah di Provinsi Sumatera Selatan dalam tahun 2001-2004, yaitu di Kabupaten Musi Rawas 8 lumbung, Kabupaten OKU (sebelum pemekaran wilayah) 28 lumbung, Kabupaten Banyuasin 17 lumbung, Kabupaten OKI 19 lumbung, Kabupaten Lahat 4 lumbung, Kabupaten Muara Enim 6 lumbung,

Kabupaten Musi Banyuasin II Lumbang. Kisaran bantuan modal yang diberikan oleh pemerintah senilai Rp 7.500.000 – 75.000.000.

Keragaan Penggilingan di Sumatera Selatan

Tahun berdirinya penggilingan, bervariasi mulai dari tahun 1982-2004. Modal tunai saat berdiri berkisar Rp 2.500.000 – 35.000.000. Pada saat berdiri, aset sarana dan prasarana yang dimiliki lumbang pangan di antaranya terdiri dari power tresher, mesin RMU, pengering mekanis, traktor tangan, timbangan, lantai jemur, gudang, pompa air. Pemilikan aset saat ini umumnya bertambah namun demikian tidak semua penggilingan memiliki aset untuk mempermudah layanannya pada pelanggan.

Saat ini kondisi modal tunai berkisar Rp 1.000.000 – 200.000.000, dengan piutang berkisar Rp 750.000 – 50.000.000, dan hutang mencapai Rp 2.500.000 namun ada juga yang tidak mempunyai hutang. Luas lantai jemur 30 m² - 698 m². Luas gudang berkisar 18-130 m², dengan daya tampung 8 – 80 ton.

Pinjaman untuk petani berkisar Rp 750.000 – 50.000.000/penggilingan. Syarat peminjaman pada dasarnya tidak ada. Namun ada di antara lumbang yang mensyaratkan surat tanah. Penentuan besar pinjaman berdasarkan kebutuhan petani, luas milik sawah, kemampuan usaha. Pembayaran hutang dapat dilakukan secara angsuran, yamen dan juga secara natura dalam bentuk beras.

Tabel 4. Keragaan Penggilingan di Sumatera Selatan tahun 2006

No	Uraian	Nilai	Persentase penggilingan (%)
I	Jumlah anggota penggilingan	28	42,85
2	Kondisi keuangan saat ini		
	Modal tunai (Rp)	46.483.300	100
	Piutang (Rp)	16.193.750	38,09
	Hutang (Rp)	3.750.000	9,52
3.	Pemilikan aset saat ini		
	Huller (unit)	I	38,09
	Polisher (unit)	I	9,52
	Mesin penggerak RMU (unit)	I-2	85,71
	Timbangan (unit)	I-2	80,95
	Traktor tangan (unit)	I	38,09
	Power tresher	I-2	42,85
	Mesin jahit karung (unit)	I-2	23,80
	Pengering mekanis	I	19,04
	Pompa air (unit)	I-2	28,57
	Luas rata-rata gudang (m ²)	65,14	38,09
	Daya tampung gudang (ton)	37,87	38,09
	Lantai jemur (unit)	I-6	52,38
	Luas lantai jemur (m ²)	572,3	52,38

Peminjaman sarana produksi yang dilayani oleh penggilingan bervariasi seperti: benih 200-2.000 kg/penggilingan, pupuk urea 1.650-10.000 kg/penggilingan, pupuk SP 36 berkisar 1.750-50.000 kg/penggilingan, pupuk KCl 50-1000 kg/penggilingan, insektisida 2-50 ltr/penggilingan, herbisida 4-40 ltr/penggilingan. Luas lahan yang diolah dengan traktor berkisar 0,5-32 ha dengan lama pengolahan 1–32 hari. Beras digiling pada musim tanam terakhir berkisar 3,5–500 ton dan yang digiling dalam tahun terakhir 11–1.000 ton.

Tabel 5. Layanan Penggilingan pada Petani Tahun 2006

No	Uraian	Rataan	Persentase penggilingan (%)
1.	Pinjaman modal kerja/penggilingan	13.955.000	71,42
2.	Benih padi (kg/penggilingan)	1.100	9,52
3.	Pupuk Urea (kg/penggilingan)	4.891	47,61
4.	Pupuk SP36 (kg/penggilingan)	2.575	38,09
5.	KCl (kg/penggilingan)	835	14,28
6.	Insektisida (ltr/penggilingan)	26	9,52
7.	Herbisida (ltr/penggilingan)	22	9,52
8.	Pengolahan lahan (ha/penggilingan)	10,8	23,81
9.	Giling beras (ton/penggilingan/tahun)	206,5	100

Sejumlah 23,80% penggilingan membedakan layanan antara anggota dengan bukan anggota. Perbedaan tersebut biasanya dari segi harga beli beras. Jika memberikan pinjaman, maka untuk bukan anggota biasanya ada batas maksimumnya, sedangkan untuk anggota ada komprominya. Ada juga penggilingan yang melayani antar jemput gabah dari dan ke lokasi petani. Untuk mempertahankan hubungan antara penggilingan dengan pelanggannya (petani) ada di antara penggilingan yang memberikan potongan harga dan kenaikan harga beras dibanding petani lain yang bukan anggota, memberikan bantuan pada saat petani mengalami musibah (kedukaan). Namun hanya 8% pengusaha penggilingan yang membedakan layanan antara pelanggan dengan bukan pelanggan penggilingan.

Penggilingan-penggilingan ini mempunyai hubungan kerja dengan berbagai pihak seperti pedagang saprodi dan beras, instansi pemerintah (pertanian dan perindustrian) untuk pembinaannya, lumbung pangan untuk peminjaman gabah dan perbankan sebagai sumber bantuan modal. Pada musim tanam terakhir dalam tahun 2006, sebanyak 23,80% penggilingan meminjam uang yang berkisar antara Rp 2.000.000–100.000.000. Terdapat 33% penggilingan yang tidak berniat meminjam uang kembali, dan 28% penggilingan yang berniat untuk meminjam uang serta 39% yang ragu untuk memutuskan meminjam atau tidak meminjam uang pada masa mendatang. Dalam upaya pemupukan modal maka pihak penggilingan menginginkan adanya bantuan dari pemerintah maupun swasta dan pembinaan dalam pengembangan modal dan cara memperolehnya melalui pemberian bantuan langsung maupun dana bergulir.

Masalah Pemanfaatan Sumber Permodalan Alternatif

Disamping sebagai wadah untuk pengamanan pangan sewaktu dalam keadaan paceklik, maka dilihat dari keberadaannya yang juga dapat berfungsi sebagai penyedia modal (uang) dan sarana produksi usahatani seperti (benih, pupuk, pestisida), maka eksistensi dari lumbung pangan masih lemah. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya keterlibatan lumbung pangan dalam pelayanannya pada petani.

Untuk melayani kebutuhan modal usahatani hanya dilayani oleh 64,28% lumbung pangan. Sedangkan untuk kebutuhan benih, pupuk, pestisida dan pengolahan lahan masing-masing hanya dilayani oleh 14,28%; 42,85%; 21,42% dan 35,71% lumbung pangan (Tabel 3). Petani yang menerima layanan dari lumbung pangan dalam hal penyediaan modal, benih, pupuk, pestisida dan pengolahan lahan masing-masing hanya sebesar 47,36%; 26,31%; 31,57%, 26,31% dan 15,78% petani. Kemampuan lumbung pangan yang rendah dalam melayani kebutuhan petani ini cukup beralasan karena sumber modalnya yang sebagian besar pada tahap awalnya adalah murni dari bantuan pemerintah, yang kemudian modal itu bisa saja berkembang tergantung dengan unit-unit usaha yang berkembang dalam lumbung pangan tersebut.

Penggilingan sebagai suatu lembaga ekonomi yang melayani kebutuhan petani juga memberikan layanannya yang relatif sama dengan lumbung pangan. Namun keberadaan penggilingan diakui lebih banyak dan muncul sebagai lembaga yang lahir dari bawah. Industri penggilingan padi ini semakin berkembang di wilayah pengembangan transmigrasi. Meskipun demikian diakui bahwa usaha inipun telah berkembang pada masyarakat lokal yang mengusahakan tanaman padi berumur panjang. Dalam kaitannya

dengan pelayanan yang diberikan pada petani, tampaknya kemampuan penggilingan inipun masih sangat terbatas. Persentase penggilingan yang melayani kebutuhan permodalan, benih, pupuk, pestisida, pengolahan lahan masing-masing sebesar 71,42%; 9,52%; 47,61%; 9,52%; 23,81% (Tabel 5). Petani yang menerima layanan dari penggilingan dalam hal penyediaan modal, benih, pupuk, pestisida dan pengolahan lahan berturut-turut hanya 44%; 16%; 44%; 16% dan 36% petani.

Keberadaan penggilingan di pedesaan dengan basis tanaman padi relatif cukup banyak (5-10 penggilingan), sementara jumlah gabah yang digiling per tahunnya bervariasi antara 11-1.000 ton/penggilingan/tahun. Namun jika berada di agroekosistem lebak atau pasang surut yang umumnya masih ditanam 1 kali dalam satu tahun maka yang digiling hanya 45-100 ton/penggilingan/tahun. Sehingga penggilingan itu mengalami masa istirahat cukup panjang di luar musim panennya. Hal ini tentunya mengakibatkan kemampuan permodalan lembaga tersebut cukup rendah untuk membantu kebutuhan sarana produksi petani.

Melihat permasalahan di atas, maka kemampuan untuk meningkatkan produksi usahatani masih terbuka luas jika didukung dengan keberadaan lembaga pendukungnya. Suatu lembaga ekonomi, tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya kelembagaan lain yang terkait. Sekuat apapun modal suatu lembaga, tetap akan membutuhkan keberadaan lembaga lain.

Arah Pengembangan Kelembagaan Permodalan Petani

Beranjak dari masalah permodalan yang berkembang di wilayah pedesaan, maka perlu adanya perbaikan terhadap kelembagaan ekonomi yang ada seperti:

- (1) Pembenahan lumbung pangan dan penggilingan. Pembenahan dimaksud terkait dengan manajemen usaha, sistem yang berjalan dan kesepakatan untuk menjalaninya. Menjadikan lumbung sebagai lembaga penyangga cadangan pangan memang amat penting. Oleh karena itu, dalam jangka pendek, upaya pemberdayaan dan penguatan lembaga lumbung pangan perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas ketahanan pangan masyarakat dalam bentuk penguatan modal usaha lumbung pangan dalam rangka meningkatkan aktivitas ekonomi di pedesaan.
- (2) Lembaga keuangan mikro. Lembaga ini dapat dibentuk dengan memobilisasi tabungan kelompok. Kenyataan menunjukkan bahwa di pedesaan dapat dihimpun dana dari petani/pemodal. Peluang ini dapat digunakan untuk membentuk lembaga keuangan mikro. Adanya beberapa kesamaan seperti domisili, adat-istiadat dan rasa kebersamaan tentunya akan memberikan kemudahan dalam mewujudkannya.
- (3) Mengembangkan keterkaitan antara lembaga keuangan mikro dengan lembaga formal. Petani secara perorangan mendapatkan kesulitan jika mengakses modal dari perbankan. Upaya yang juga dapat dilakukan untuk mengatasinya adalah menghimpun mereka dalam satu kelompok (lembaga keuangan mikro) untuk mengakses modal tersebut. Hal ini tentunya perlu didukung dengan pembinaan manajemen dan usaha anggota agar memunculkan rasa kepercayaan dari lembaga formal (bank).

KESIMPULAN

Dari hasil yang diperoleh dan pembahasan yang dilakukan maka dapat disimpulkan:

1. Penggilingan padi meskipun dimiliki secara perorangan, selain berfungsi sebagai lembaga produksi, juga menjalankan perannya sebagai lembaga yang menyediakan modal kerja bagi petani. Dalam kiprah usahanya, dengan keterbatasan yang ada, dirasakan sebagai penolong karena kemudahan-kemudahan yang diberikan untuk melayani petani.
2. Lumbung pangan sebagai lembaga bentukan pemerintah, dalam melayani kebutuhan modal petani belum mampu berperan penuh karena keterbatasan kemampuannya. Sehingga lumbung ini memang perlu didukung oleh pemodal-pemodal baik formal (Bank) maupun informal (perorangan) di pedesaan guna melayani kebutuhan petani.

3. Arah pengembangan lembaga ekonomi pedesaan dapat dilakukan melalui: (a) Pembenahan lumbung pangan dan penggilingan, (b) Penumbuhan lembaga keuangan mikro, (c) Mengembangkan keterkaitan antara lembaga keuangan mikro dengan lembaga formal.

SARAN

Untuk meningkatkan kemampuan lumbung pangan dan usaha penggilingan padi dalam melayani kebutuhan modal petani, maka lembaga ini perlu mengembangkan hubungan kerjasama baik secara internal maupun eksternal dalam memperluas spektrum usaha dan sumber-sumber tambahan modal. Hal ini mengisyaratkan bahwa lembaga permodalan alternative yang ada tersebut masih memerlukan adanya pembinaan dari instansi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan, 2006. Kerangka Acuan Pemantauan Perkembangan Sumber Permodalan Lembaga Ekonomi Perdesaan. Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan, Palembang.
- Sukirno, S., 1985. Ekonomi Pembangunan. Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan. Kerjasama Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan Bina Grafika, Jakarta.
- Syahyuti, 2004. Pemerintah, Pasar dan Komunitas. Faktor Utama dalam Pengembangan Agribisnis di Pedesaan. FAE Vol. 22 No. 1.
- Weiner, M., 1986. Modernisasi Dinamika Pertumbuhan. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.